

# Efektivitas Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

Dimas Adi Putra<sup>1\*</sup>, Syaprianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia

Email : <sup>1\*</sup>[dimasadi490@gmail.com](mailto:dimasadi490@gmail.com)

(\* : coressponding author)

**Abstrak** - Studi ini membahas tentang proses pelayanan publik merupakan hubungan interaksi antara dua unsur yaitu pihak pemerintah dengan publik. Permasalahan yang dirumuskan adalah kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan public. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Natuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membutuhkan waktu yang cukup lama saat pencarian surat masuk, surat keluar, dan surat dinas serta penyimpanan dokumen surat dalam rak dapat menyebabkan surat-surat hilang maupun mudah rusak. Oleh karena itu, pengembangan SDM dilakukan melalui dengan memberikan pegawai pelatihan-pelatihan khusus dalam penerapan sistem informasi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang ada dikantor, seperti pekerjaan mengarsip surat masuk dan surat keluar. Masyarakat yang dapat bekerja sama dan mengerti setiap proses pelayanan menjadikan tidak adanya keterlambatan atau masalah lain dari Sistem Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Natuna. Inovasi-inovasi dilakukan Kabupaten Natuna untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Disdukcapil, Kabupaten Natuna.

*Abstract - This study discusses the public service process, which is an interaction relationship between two elements, namely the government and the public. The problem formulated is the scarcity of resources and budget limitations in the implementation of public services. The research methods used in this research are observation and interviews. The aim of this research is to determine the effectiveness of the performance of the Natuna Regency Population and Civil Registration Service. The research location is at the Population and Civil Registration Service in Natuna Regency. The results of the research show that it takes quite a long time to search for incoming mail, outgoing mail and official mail as well as storing mail documents on shelves which can cause the mail to be lost or easily damaged. Therefore, human resource development is carried out by providing employees with special training in the application of information systems in the process of completing work in the office, such as the work of archiving incoming and outgoing letters. Communities who can work together and understand every service process will ensure that there are no delays or other problems with the Natuna Regency Dukcapil Service System. Natuna Regency has made innovations to get better services.*

**Keywords:** Effectiveness, Disdukcapil, Natuna Regency.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia masih mempunyai kelemahan dalam bidang tenaga kerja. Semakin sedikit keterampilan yang dimiliki, maka semakin sedikit kemungkinan tenaga kerja di Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pekerjaan.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diberbagai perusahaan dan instansi sangat berguna bagi mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dan mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna, serta dapat menambah pengetahuan mahasiswa, sehingga mampu menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan nya.

Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu memberikan suatu kompetensi yang penting yang akan digunakan dalam dunia kerja, baik kompetensi akademik maupun kompetensi non akademik. Hal tersebut, harus masuk kedalam pencapaian perguruan tinggi agar nantinya lulusan – lulusan tersebut dapat menjadi sumber daya manusia yang profesional dan produktif serta mampu memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, tenaga kerja Indonesia perlu diberikan suatu keterampilan yang mendukung kebutuhan dunia instansi pemerintah.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Berkaitan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah, para ilmuwan mengemukakan pendapat diantaranya, Tatiek Sri Djatmiati (2004), mengemukakan pengertian fungsi dalam arti Normatif, dalam Disertasinya yang berjudul “Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia”, adalah: “Dalam artian ini fungsi adalah “Tugas” yang berkaitan dengan Jabatan Publik.” Pengertian ini menunjukkan pada tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat publik dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah.

Menurut Suryaningrat (1978:2), pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.

Menurut Nugroho (2003. 36), pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan.

Dari pendapat tersebut di atas menunjukkan tugas-tugas pemerintah yang harus dijalankan atau dilaksanakan paling sedikit tiga fungsi, yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Tugas - tugas pemerintahan dalam arti yang luas tersirat dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dari alinea keempat pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut diatas, terlihat prinsip tujuan membentuk suatu pemerintahan dalam Negara Indonesia, bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik yaitu diantaranya:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia
- Seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum.

Berkaitan yang telah dikemukakan tersebut di atas, masalah yang akan diteliti dan setelah itu akan dilanjutkan dengan suatu pengkajian, baik dari segi hukum, asas- asas, prinsip hukum, dan teoriteori hukum, khususnya teori pembagian kewenangan, dalam kaitan pembagian tugastugas pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan Kepala Dinas dan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, yang bertujuan untuk mengetahui seputar bagaimana cara manajemen pelayanan administrasi kependudukan dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, dan kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Natuna.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari pelaksanaan kerja PKL yang dilaksanakan selama dua bulan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, penulis menemukan kendala yaitu proses pencarian dokumen bukti surat masuk, surat keluar dan surat dinas lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama saat pencarian surat ketika diperlukan, penyimpanan dokumen surat dalam rak dapat menyebabkan surat-surat hilang maupun mudah rusak.

Dari pelaksanaan PKL ini juga, penulis menemukan kendala pada waktu pekerjaan yang kurang efektif. Waktu pekerjaan pegawai tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, hal ini dikarenakan pegawai lebih memilih menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu walaupun jam istirahat sudah masuk. Hal ini dapat menyebabkan kurang maksimalnya pekerjaan pegawai karena karna

kurang istirahat dapat menyebabkan kelelahan dan berkurangnya produktivitas pekerjaan.

## **5. KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa membutuhkan waktu yang cukup lama saat pencarian surat masuk, surat keluar, dan surat dinas serta penyimpanan dokumen surat dalam rak dapat menyebabkan surat-surat hilang maupun mudah rusak. Oleh karena itu, perlu pengembangan SDM dinegara kita mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, yang merupakan sumber produktif potensial sehingga dapat diubah menjadi sumber produktif yang nyata. Pengembangan SDM dilakukan melalui dengan memberikan pegawai pelatihan- pelatihan khusus dalam penerapan sistem informasi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang ada dikantor, seperti pekerjaan mengarsip surat masuk dan surat keluar. Pelatihan yang dimaksud adalah menyediakan kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Idochi. (1984). Teori Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Budimanta dan Rudito. 2008. Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development. Jakarta: CSD.
- Burhan Bungin. 2009. Analisis Penelitian Data Kualitatif. Raja Grafindo: Jakarta.
- Gie, t.l., 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Jogjakarta: Liberty.
- Kusdinar, I.C.D., 2014. Sistem Informasi Arsip Surat Masuk Dan Surat Keluar.
- Hardjanto, Imam. 2006. Pembangunan Kapasitas Lokal CLocal Capacity Building). Program Pascasarjana Universitas Brawijaya: Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil dan Christine, 2003. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. P.T Rineka Cipta. Jakarta.
- Keban, Yeremia. 2010. Enam Dimensi Strategik Administrasi Negara. Gaya Media; Yogyakarta.
- Labolo, M. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Kelapa Gading Mangkunegara, Anwar Prabu. 2013. Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan. Bandung: remaja Rosda karya Rosda karya Siagian, Sondang. P. Filsafat Administrasi. Edisi revi. Jakarta.